

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10 Agustus 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986. *Peradilan Tata Usaha Negara*. 29 Desember 1986. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3344. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. 29 Maret 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4380. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009. *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. 29 Oktober 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5079. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. *Kekuasaan Kehakiman*. 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014. *Administrasi Pemerintahan*. 17 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985. *Mahkamah Agung*. 30 Desember 1985. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. 20 Juli 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5226. Jakarta.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24/PUU-XII/2024 tentang Pihak yang dapat Mengajukan Peninjauan Kembali dalam Sengketa Tata Usaha Negara

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

## **Buku**

Asshiddiqie, Jimly, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Setjen Kepaniteraan MKRI, 2006

- Fachrudin, Irfan, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Mataram: Cahaya Atma Pustaka, 2020
- Fadjar, Abdul Muhktie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008
- Marbun, SF., *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2003
- Safaat, Ali, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2016
- Siallagan, Haosan; Kasman Siburian; dan Fernando Z. Tampubolon, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Medan: Lembaga Pemberdayaan Media dan Komunikasi (LAPiK), 2019
- Soebechi, Imam, *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Press, 2014
- Sumadi, Ahmad Fadlil; Achmad Edi Subiyanto; dan Anna Triningsih, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Depok: Rajawali Press, 2020
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Tjandra, W. Riawan, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020

Wibowo, Mardian, *Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2018

Wijaya, Endra, *Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011

Wiyono, R., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Yusa, I Gede, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Malang: Setara Press, 2016

Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

## **Jurnal**

Dewi, Putu Ayu Sintya Pradnya; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, “Efektivitas Pelaksanaan Putusan oleh Tergugat Selaku Badan atau Pejabat TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar”, dalam *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2024

Ermawati, Sri Wahyuni, “Kewenangan atau Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas Subyek Sengketa di Indonesia”, dalam *JUSTICE: Journal of Law*, Vol. 3, No. 1, 2024

Fatah, M. Afif Gusti, “Kedudukan SEMA sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim”, dalam Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 7, No. 1, 2024

Hadiansyah, Mochammad Suwanda; Bobang Noorisnan Pelita; dan Lutfi Fahrul Rizal, “Politik Hukum tentang Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap Pejabat/Badan Tata Usaha Negara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2024: Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*”, dalam Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6, No. 2, 2025

Hananto, V. Andri, “Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu”, dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 32, No. 1, 2025

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, dalam Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol. 01, No. 1, 2019

Kambu, Wari Martha, “Tinjauan Yuridis tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945”, dalam Jurnal *Lex Et Societatis*, Vol. 9, No. 1, 2021

Luntungan, Edward Imanuel, “Aspek Hukum terkait Legal Standing dalam Mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi”, dalam Jurnal Lex Privatum-Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 16, No. 1, 2025

- Noorsanti, Inggal Ayu dan Ristina Yudhanti, “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa”, dalam *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2023
- Nugroho, Fadzlun Budi Sulisty, “Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi”, dalam *Gorontalo Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2019
- Nur, Syarifa, “Aspek Yuridis tentang Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) terhadap Putusan yang Berkekuatan Tetap”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 4, No. 2, 2016
- Paradizsa, Irlandi dan Budi Susanto, “Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah: Dukungan, Kritik, Serta Penerapan Undang-Undang”, dalam *Jurnal Progress in Social Development*, Vol. 4, No. 2, 2023
- Prahastapa, Anita Marlin Restu; Aju Putrijanti dan Lapon Tukan Leonard, “Friksi Kewenangan PTUN dalam Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN), dalam *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017
- Putrijanti, Aju dan Lapon Tukan Leonard, “Kompetensi Peratun untuk Memeriksa Unsur Penyalahgunaan Wewenang”, dalam *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2019

Putrijanti, Aju; Lapon Tukan Leonard, dan Kartika Widya Utama, “Model Fungsi Pengawasan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Upaya Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 2, 2017

Setyono, Yoni A., “Tinjauan “Novum” dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara”, dalam Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49, No, 1, 2019

Soleh, Mohammad Afifudin, “Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap”, dalam Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 06, No. 02, 2018

### **Skripsi**

Salwa, Arsha Nurul, *Analisis Yuridis Ketidakwenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam Mengajukan Upaya Peninjauan Kembali*, Skripsi Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang

### **Website dan Artikel**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbudristek, “KBBI VI Daring”. Diakses 23 Oktober 2025, <https://kbbi.web.id/peradilan>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “IRT Perbaiki Permohonan Uji Norma PK dalam UU PTUN”. Diakses 14 Januari 2026, <https://www.mkri.id/berita/-20105>

Nofan. PTUN Surabaya, “Respon Konstitusional PTUN Surabaya atas Pembatasan Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Badan/Pejabat TUN Pasca Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024”, Diakses 16 Januari 2026, <https://www.ptun-surabaya.go.id/respons-konstitusional-ptun-surabaya-atas-pembatasan-pengajuan-peninjauan-kembali-oleh-badan-pejabat-tun-pasca-putusan-mk-nomor-24-puu-xxii-2024/>

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, “Pengajuan Upaya Hukum”. Diakses 13 November 2025, <https://ptun-banjarmasin.go.id/layanan-hukum/gugatan-permohonan/prosedur-pengajuan-4>

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, “Prosedur Pengajuan Gugatan dan Biaya Perkara”. Diakses 10 Februari 2026, [https://www.ptun-surabaya.go.id/layanan\\_hukum\\_page/prosedur-pengajuan-gugatan-dan-biaya-perkara/](https://www.ptun-surabaya.go.id/layanan_hukum_page/prosedur-pengajuan-gugatan-dan-biaya-perkara/)

## **Wawancara**

Wawancara bersama Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Bapak Alponteri Sagala, S.H., pada 19 Februari 2026